

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menangani praktik pemungutan liar di Lingkungan Pasar Manis Ciamis. Pemungutan liar merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik. Pasar sebagai sarana pelayanan publik seharusnya dikelola secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, masih adanya pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, terutama pada sektor parkir, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta telaah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan retribusi daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari pihak DKUKMP, UPTD Pasar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta perwakilan pedagang Pasar Manis Ciamis. Proses analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan menerapkan triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi praktik pemungutan liar, seperti pengawasan rutin, pembinaan kepada petugas, serta sosialisasi peraturan daerah mengenai retribusi pasar. Meskipun demikian, praktik pungutan tambahan seperti parkir tanpa karcis resmi masih ditemukan dan belum memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan tahapan kebijakan menurut Bridgman dan Davis, penanganan pungutan liar di Pasar Manis Ciamis masih berada pada tahap analisis kebijakan karena belum tersedia regulasi khusus yang mengatur pengelolaan parkir pasar secara rinci. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah masih perlu diperkuat melalui pembentukan regulasi yang lebih tegas, peningkatan pengawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik pungutan liar.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pemungutan Liar, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the role of the Ciamis Regency Government in addressing illegal levy practices in the Pasar Manis Ciamis area. Illegal levies represent a form of deviation in public service delivery, as a public service facility, the market should be managed transparently, responsibly, and in accordance with the principles of good governance. However, the existence of additional charges without a clear legal basis, particularly in the parking sector, indicates a mismatch between policy provisions and their implementation.

This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, direct observations, and document analysis related to market management and regional retribution. Informants were selected purposively, including officials from DKUKMP, UPTD Pasar, the Department of Transportation, Satpol PP, and representatives of Pasar Manis Ciamis traders. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and method triangulation to enhance the accuracy and credibility of the findings.

The results indicate that the Ciamis Regency Government has undertaken various measures to address illegal levy practices, such as routine supervision, staff guidance, and dissemination of regional regulations concerning market retribution. Nevertheless, additional charges such as parking fees without official tickets are still found and lack a clear legal basis. Based on the policy stages proposed by Bridgman and Davis, the handling of illegal levies in Pasar Manis Ciamis remains at the policy analysis stage due to the absence of specific regulations governing market parking management in detail. Therefore, the role of the local government needs to be strengthened through firmer regulations, improved supervision, and increased public participation in reporting illegal levy practices.

Keywords: *Local Government, Illegal Levies, Public Policy.*